

Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Multikultur Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik

¹Busra Bumbungan, ²Bahrudin, ³Lalu Sugiar

¹Universitas Cokroaminoto Palopo, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

Indonesian Journal of
Learning Studies (IJLS)

Vol. 3, No. 2, 2024

E-SSN 2775-5231

Correspondence Author:

Busra Bumbungan

busrabumbungan@uncp.ac.id

Published by:

Perkumpulan Dosen Muslim
Indonesia



Copyright © 2024

The Author(s)

This article is licensed under

CC BY-NC-SA 4.0 License



Abstrak

Strategi kepemimpinan menjadi bagian yang prioritas bagi seorang pimpinan di sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah. Esensi kepemimpinan kepala sekolah terletak pada kemampuan mengubah paradigma bawahan dalam menyikapi berbagai kondisi sekolah seperti multikulturalisme. Kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Atas dalam menerapkan kepemimpinan berbasis multikultural, maka kepala sekolah mengakumulasi secara keseluruhan perbedaan etnis, bahasa dan agama sebagai wujud kekayaan budaya Negara Indonesia. Kepemimpinan multikultural menghasilkan output pendidikan yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan menjadi siswa yang berkarakter dengan memperhatikan latar belakang multikulturalisme.

Kata kunci: *kepemimpinan, kepala sekolah, multikultur, karakter*

Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Multikultur Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik

Pendahuluan

Perbedaan etnis, budaya dan agama adalah keunikan yang dimiliki oleh negara majemuk. Keunikan tersebut menjadi kekayaan bagi Negara Indonesia sebagai Negara yang multikultural. Multikultural mengajarkan masyarakat untuk menghargai keberagaman. Lizak dan Eres (2014:4) mengatakan bahwa ketidakmampuan mengelola dengan sebaik mungkin keragaman tersebut maka dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Konflik tersebut dapat dihindari jika masyarakat mampu menjaga sikap toleransi dalam keberagaman. Apalagi dalam menghadapi berbagai ancaman era globalisasi.

Globalisasi merupakan masa dimana interaksi antarbangsa menjadi semakin intensif, dan terbuka yang memberikan peluang terjadinya proses saling mempengaruhi antar budaya. Meskipun proses saling mempengaruhi tidak langsung terlihat namun perlakuan atau kebiasaan yang terjaga akan menunjukkan pengaruh didalan buday (Kitayama, 2002). Kehadiran globalisasi seyogianya disambut dengan kesiapan pemimpin yang mampu menjadi *figure* dalam hal keberagaman etnis. Dengan demikian, pemimpin tersebut memberikan dampak terhadap perubahan persepsi bawahan akan pentingnya multikultural. Demikian halnya dalam pendidikan. (Zander *et al*, 2012:259). Kehadiran multikultural akan menjadi penetralisir bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar dalam peradapan dan kebudayaan, aspek tersebut memiliki posisi yang sama, sehingga asumsi tentang adanya kebudayaan yang tinggi atau lebih tinggi dari kebudayaan yang lain hanya akan melahirkan sikap *fasisme, nativisme dan chauvinism*.

Mengenai multikultural, pendidikan sangat dibutuhkan dalam menyikapi keadaan yang memungkinkan melahirkan suatu permasalahan. Keberagaman budaya akan menjadi dinamika dalam proses pendidikan. Dapatkah keberagaman ini akan menjadi aset ataukah justru menghancurkan? Sebuah tanda tanya bagi pelaku pendidikan.

Proses pendidikan pada prinsipnya memberikan ruang yang sama bagi siapapun sekalipun memiliki perbedaan baik latar belakang agama, jenis kelamin, etnis, kelas sosial, budaya, dan warna kulit. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa.

Urgensi Multikultur di Indonesia

Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan nasional. Pendidikan yang ada sekarang ini cenderung menggunakan metode kajian yang bersifat dikotomis. Maksudnya, pendidikan agama berbeda dengan pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menekankan pada disiplin ilmu yang bersifat normatif, establish, dan jauh dari realitas kehidupan. Sedangkan pendidikan nasional lebih cenderung pada akal atau inteligensi yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai kemanusiaan. (Ekşi, 2003) berpendapat bahwa tujuan dasar Pendidikan Nasional adalah mendidik manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Salah satu penyebab munculnya masalah dalam pendidikan nasional adalah adanya perbedaan pandangan mengenai hakikat manusia. Perbedaan pandangan ini menciptakan perpecahan yang semakin tajam, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Fenomena ini semakin jelas terlihat ketika para pengelola lembaga pendidikan menunjukkan sikap fanatisme yang kuat, menganggap paradigma mereka sebagai yang paling benar, sementara pandangan lain dianggap salah dan perlu diluruskan.

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sepanjang hidupnya, manusia menjalani proses pendidikan. Jika tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang utuh dalam semua aspek kemanusiaannya, maka setiap aspek kehidupan harus terhubung

dengan dimensi spiritual (teologis), moral, sosial, emosional, rasional (intelektual), estetis, dan fisik. Namun, kenyataannya proses pendidikan kita masih banyak berfokus pada aspek kognitif saja, terutama pada nilai ujian sebagai standar kelulusan. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak berkembang menjadi individu yang utuh. Akibatnya, berbagai tindakan negatif seperti tawuran, konflik, penghilangan etnis, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, korupsi, dan ketidakjujuran dapat terjadi

Berdasarkan fakta yang ada, keberadaan pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diterapkan dalam berbagai mata pelajaran sangatlah penting. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan budaya yang dimiliki siswa, mengingat bahwa pendidikan multikultural telah ada sejak awal berdirinya bangsa Indonesia. Meskipun siswa saat ini hidup di era globalisasi dan modernisasi, pendidikan formal di masyarakat yang multietnis tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan universal yang modern, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai budaya lokal (xing, 2012).

Pendidikan multikultural dipandang sebagai suatu proses yang tidak pernah berakhir atau berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menekankan pentingnya penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu, pendidikan ini bertujuan untuk memberikan siswa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang multikultural. (Merlin, 2017)

Konsep pendidikan multikultural telah menyebar ke berbagai negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya, seperti Indonesia. Secara sederhana, wacana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang membahas keragaman budaya sebagai respons terhadap perubahan demografis dan kultural di masyarakat tertentu atau bahkan di seluruh dunia. Hal ini sejalan dengan pandangan Freire (1984) bahwa pendidikan tidak boleh terpisah dari realitas sosial dan budaya. Pendidikan seharusnya mampu menciptakan masyarakat yang terdidik dan berpengetahuan, bukan sekadar masyarakat yang mengedepankan prestise sosial akibat kekayaan dan kemakmuran.

Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman dalam populasi sekolah serta tuntutan untuk kesetaraan hak bagi setiap kelompok. Secara luas, pendidikan ini mencakup semua siswa tanpa memandang perbedaan seperti gender, etnis, ras, budaya, status sosial, dan agama (xing, 2012:163). Bank (2011), sebagai pelopor pendidikan multikultural, menyatakan bahwa inti dari pendidikan ini adalah untuk kebebasan serta sebagai gerakan inklusif untuk mempererat hubungan antarindividu. Program pendidikan multikultural tidak hanya fokus pada kelompok rasial atau agama tertentu (Tilaar, 2002).

Setelah mempertimbangkan penjelasan mengenai pendidikan multikultural di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini adalah proses pengembangan potensi manusia yang meliputi aspek sosial, intelektual, religius, ekonomi, moral, serta kebudayaan. Pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas menjadi sangat penting dalam masyarakat saat ini. Pluralitas tidak hanya mencakup keragaman etnis dan suku tetapi juga beragam pemikiran, paradigma, paham ekonomi, politik, dan lainnya. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada klaim dari satu kelompok bahwa mereka lebih unggul dibandingkan kelompok lain. Upaya pemaksaan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural.

Esensi Kepemimpinan Kepala Sekolah

Pendidikan menjadi wadah dalam rangkai membentuk jati diri, mengasah mental sampai pada aspek tumbuhnya karakter siswa. Realitanya, pendidikan belum mampu memberikan hasil yang maksimal dalam membentuk sikap dan rasa saling menghargai terhadap keberagaman. Hal ini ditandai dengan masih terjadinya konflik dengan nuansa SARA di Indonesia. Kejadian tersebut merupakan masih lemahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu topik yang ditawarkan untuk menyikapi keadaan tersebut melalui revitalisasi pendidikan.

Revitalisasi pendidikan sebagai perubahan paradigma pendidikan dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat menjadi sebuah model kepemimpinan yang mampu mengayomi keragaman budaya siswa serta dalam pandangan global, pemimpin dengan basis multikultural diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bawahan. Kepemimpinan didefinisikan secara luas sebagai pengaruh proses yang mempengaruhi penafsiran peristiwa bagi pengikut, pilihan tujuan bagi organisasi kelompok, organisasi kegiatan kerja untuk mencapai tujuan, motivasi pengikut untuk mencapai tujuan, pemeliharaan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi Gary Yukl (dalam Yantoro, 2013).

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan sentral dalam pengelolaan suatu organisasi sekolah. Kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan di sekolah perlu menggunakan kemampuan dan keterampilan secara maksimal dalam usaha mencapai tujuan dengan konsep multikultural dalam membentuk kecakapan hidup siswa. Diyakini bahwa konsep multikultural yang diberlakukan oleh kepala sekolah akan berkontribusi positif terhadap pendidikan seperti memberikan ruang tersendiri bagi siswa (Alexander, 2015).

Kehadiran kepala sekolah sangat penting karena merupakan motor penggerak bagi sumber daya yang ada di sekolah, kepala sekolah memiliki inisiatif dalam melakukan perubahan (Malakolunthu, 2010). Kepala sekolah memainkan peran penting dalam melakukan perubahan dan menerapkan inisiatif perbaikan di sekolah terutama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Begitu besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.

Salah satu kunci keberhasilan dalam organisasi seperti sekolah adalah sistem kepemimpinan yang diterapkan seorang kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin yang berada di garis terdepan ketika membahas tentang konteks pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah merupakan aktor penting di sekolah yang berperan dalam efektivitas sekolah sehingga dapat berhasil (Ekosiswoyo, 2007:79). Sistem kepemimpinan yang berlaku dalam pendidikan didasarkan pada kualitas tertentu yang harus dimiliki kepala sekolah dalam rangka mengembangkannya. Kualitas yang dimiliki kepala sekolah yakni: (a) mengetahui dengan benar sistem pencapaian visi, (b) memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi yang telah disepakati sehingga visi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan, (c) peningkatan integritas dalam rangka pembentukan karakter (Ekosiswoyo, 2007).

Kepemimpinan kepala sekolah memiliki fungsi menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain melaksanakan tugas dengan esensial dan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama. Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin hendaknya memahami gaya/tipe kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan, dan fungsi kepemimpinan serta iklim organisasi. Selain itu, peran kepala sekolah yang sangat besar yang akan membawa perubahan pendidikan. Peran kepemimpinan Kepala Sekolah (Sergiovanni, 2006) kepemimpinan kepala sekolah meliputi kepemimpinan formal, administratif, organisasi, supervisi, dan tim. Kepemimpinan formal mencakup perumusan visi dan misi organisasi; administratif berkaitan dengan pembinaan administrasi staf; supervisi berfokus pada pembimbingan tenaga pendidik; organisasi menciptakan iklim kerja kondusif; dan tim membangun kerjasama antar anggota.

Sosok kepala sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab di sekolah diharapkan dapat mengaplikasikan konsep kepemimpinan multikultur. Kenapa harus multikultur? Keragaman budaya, etnis dan agama adalah aspek dalam pendidikan dengan konsep multikultur yang diyakini bahwa warga sekolah berada dalam keadaan damai dan tenang. Konsep multikultur akan menjadikan kepala sekolah pemimpin yang sesuai dengan situasi, budaya dan kondisi lingkungan yang beragam.

Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Multikultur

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi, mengajak dan menggerakkan hati seseorang untuk melakukan aktifitas demi mencapai tujuan. Pemimpin adalah inspirator dan motivator bagi orang lain agar melakukan pekerjaan. Relasi merupakan salah satu kekuatan bagi kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinan. Seni kepemimpinan dalam pendidikan adalah menanamkan pengaruh kepada guru agar mereka melakukan tugasnya sepenuh hati dan antusias. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik, diharapkan guru akan lebih baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kepala sekolah yang menunjukkan kepemimpinannya dengan memberikan contoh yang baik akan menjadi contoh dan pembimbing bagi masyarakat di sekolah. Dengan kepemimpinan yang baik, akan tercipta kondisi kerja yang baik dan mendukung terciptanya mitra kerja yang baik (Tukiyo *et al*, 2017).

Kepemimpinan multikultur adalah jenis kepemimpinan yang mengadopsi perspektif multikultural. Istilah "multikultur" merujuk pada perbandingan atau pengelolaan dua atau lebih budaya yang berbeda, terutama dalam konteks pendidikan yang melibatkan keragaman budaya daerah dan bangsa. Setiap individu dianggap memiliki potensi kreatif, emosional, dan keinginan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini memberikan kekuatan bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui integrasi budaya (Hong & Chiu, 2001). Konsep ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki kesempatan untuk memahami lebih dari satu budaya.

Paradigma pendidikan multikultural bertujuan untuk menghilangkan stereotip serta sikap egois, individualis, dan eksklusif di kalangan siswa. Sebaliknya, pendidikan multikultural diarahkan untuk membangun pandangan yang lebih komprehensif terhadap sesama, dengan menyadari bahwa keberadaan individu tidak terpisahkan dari lingkungan yang beragam, termasuk etnisitas, ras, agama, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat membantu siswa dalam mengenali budaya, suku bangsa, dan masyarakat global. Pengenalan budaya mencakup pengenalan terhadap berbagai tempat ibadah, lembaga sosial, dan sekolah. Sementara itu, pengenalan suku bangsa melatih anak untuk hidup sesuai dengan kemampuannya dan berkontribusi positif sebagai anggota masyarakat. Melalui pemahaman global, siswa diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam konteks kehidupan global yang mereka hadapi.

Dominasi budaya tertentu dalam suatu komunitas termasuk lembaga Pendidikan dapat memicu ketegangan yang berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini sering terjadi akibat penempatan identitas lokal, nasional, atau universal yang tidak tepat saat berinteraksi atau bersosialisasi. Tanpa kesadaran yang luas, individu dapat merasa benar dengan membawa dominasi identitas lokal ke dalam komunitas multikultural. Oleh karena itu, diperlukan paradigma kepemimpinan yang tepat untuk mencegah dominasi budaya tertentu dalam komunitas yang beragam. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, perlu ada pergeseran dari paradigma kepemimpinan hierarkis-otokratis menuju kepemimpinan berbasis kemitraan dalam kerangka kepemimpinan multikultural.

Seorang pemimpin yang menerapkan kepemimpinan multikultur akan menunjukkan perbedaan budaya antara dirinya dan pengikutnya. Kepemimpinan multikultur mencerminkan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok yang berasal dari latar belakang budaya berbeda secara seimbang menuju tujuan bersama. Ini berarti pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi serta kondisi lingkungan yang beragam.

Perilaku kepemimpinan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh pemimpin tersebut (Bowditch dan Buono dalam Alas, 2006:237). Seorang pemimpin perlu menyadari bahwa meskipun individu berada dalam satu unit kerja yang sama, mereka tetap memiliki nilai-nilai yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas dalam proses kepemimpinan, setiap pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang ada agar tidak menimbulkan masalah atau konflik dengan bawahannya maupun organisasi secara keseluruhan.

Multikultur di Sekolah Menengah Atas

Berbicara multikultur di sekolah pada tingkatan Sekolah Menengah Atas, hal tersebut bukanlah hal asing lagi pada Sekolah Menengah Atas di Palopo. Perbedaan atau keragaman budaya, agama, serta etnik, dapat dikatakan sebagai warna tersendiri yang menghiasi proses pendidikan di sekolah. Hadirnya keberagaman etnis, seperti etnis Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar di dalam sekolah menjadi tantangan bagi kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinan. Keragaman etnis, berbanding lurus dengan keragaman agama dan budaya yang dianut masyarakat, bahkan banyaknya etnis pendatang di daerah Palopo menjadikan keragaman yang semakin berwarna.

Kepemimpinan multikultural Sekolah Menengah Atas pada pendidikan merujuk pada kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi sumber daya sekolah yang berbeda budaya dengan sengaja dan tidak seimbang menuju sasaran yang diterapkan dan memberlakukan sama tanpa memandang aspek apapun. Dengan cara pandang tersebut, bawahan akan bekerja tanpa beban demikian halnya dengan pembelajaran akan mencapai target. Kepemimpinan multikultural berupaya memperdayakan setiap sumber daya sekolah yang dibingkai dengan perspektif multikultur agar komponen sekolah terlibat dan bertanggung jawab dalam pendidikan.

Penanaman nilai-nilai multikultural dilaksanakan melalui berbagai aktivitas organisasi kesiswaan dan kegiatan keagamaan yang kepanitiaannya bersifat gabungan lintas agama. Pemilihan pengurus OSIS, PMR, Pramuka dan yang lainnya. Kegiatan tersebut di sekolah terbuka untuk semua siswa yang ada di sekolah dan berlangsung secara demokratis karena setiap siswa tidak dibedakan jenis kelamin, agama, adat atau asal suku bangsanya memiliki kesempatan yang sama yang duduk dalam jajaran kepengurusan. Kesuksesan kegiatan kesiswaan tersebut tak dapat memungkiri keberadaan kepemimpinan kepala sekolah yang berbasis multikultural.

Kelompok yang berbeda tersebut oleh sekolah diberi kebebasan untuk beraktualisasi sesuai dengan identitas kebudayaannya masing-masing. Setiap siswa mendapat pendidikan agama dari guru agama yang sesuai dengan agama masing murid sehingga semua sekolah sudah memenuhi amanat UU No. 20 tahun 2003 khususnya pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama juga mempersiapkan guru agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu.

Menumbuhkan Karakter Siswa Dalam Multikultur

Pendidikan karakter adalah sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk menciptakan sekolah yang mendidik generasi muda agar memiliki etika, tanggung jawab, dan kepedulian. Pendidikan karakter tidak hanya sekadar mengajarkan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Lebih dari itu, pendidikan ini berfokus pada penanaman kebiasaan baik (habituation) sehingga siswa dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan tiga aspek: pengetahuan moral (moral knowing), perasaan positif atau cinta terhadap kebaikan (moral feeling), dan tindakan moral yang baik (moral action).

Pendidikan yang berlandaskan karakter dan budaya bangsa adalah pendidikan yang menerapkan prinsip dan metodologi untuk membentuk karakter peserta didik melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Oleh karena itu, kerangka pengembangan karakter dan budaya bangsa melalui proses pembelajaran di kalangan pendidik sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan bahwa tenaga pendidik diberikan kesempatan yang luas dalam membina generasi bangsa. Hilangnya kesempatan tersebut dapat mengakibatkan kreativitas dan disiplin siswa menjadi hilang (Jensen dalam Lee *et al*, 2013).

Dunia pendidikan perlu berperan secara aktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terdidik dan siap menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Hasil dari pendidikan tidak hanya sebatas penguasaan teori-teori, tetapi juga

harus mencakup kemampuan dan kemauan untuk menerapkannya dalam kehidupan sosial. Selain itu, lulusan diharapkan tidak hanya mampu menggunakan ilmu yang diperoleh di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan karakter bangsa dapat dimulai dari bagaimana mengubah isu multikulturalisme menjadi wacana kebangsaan. Semangat kebangsaan merupakan perasaan penting bagi setiap warga negara Indonesia (Thoriquttyas and Rohmawati, 2017:3).

Karakter dari bahasa Yunani yang berarti *"to mark"*. Istilah ini merujuk pada tindakan atau perilaku seseorang. Menurut Muslich (2011:71), karakter memiliki dua makna, yaitu menggambarkan cara seseorang berperilaku dan hubungannya dengan kepribadian. Perilaku tersebut mencerminkan karakter yang mulia, dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Sedangkan personaliti artinya seseorang berkarakter jika tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Sekaitan dengan karakter sebagai suatu hal yang abstrak (Ryan & Bohlin dalam Ülger, 2014), maka dibutuhkan proses pembelajaran di sekolah sebagai wadah yang pantas untuk membentuk karakter siswa. Hal demikian menuntut peran yang lebih dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta keterlibatan keluarga dan teman sebaya dalam menuntaskan tujuan terbentuknya karakter siswa.

Persoalan mengenai karakter siswa kini menjadi perhatian utama masyarakat, menjadi isu yang mendominasi pemikiran dan keprihatinan banyak orang di Indonesia. Inti permasalahan ini berkaitan dengan semakin hilangnya nilai-nilai budaya dan karakter dalam kehidupan sosial (Kemendiknas, 2010:2).

Siswa yang memiliki karakter baik adalah individu yang memahami, menginginkan, dan mencintai kebaikan, serta berusaha untuk melakukannya. Karakter itu sendiri merupakan aspek yang sangat fundamental dan krusial. Ia adalah ciri khas yang membedakan manusia dari hewan (Muslich, 2011:75).

Menurut Alwisol (2008:38), karakter mencerminkan perilaku yang diekspresikan dengan menonjolkan nilai-nilai (benar-salah, baik-buruk) baik secara implisit maupun eksplisit. Karakter berbeda dari kepribadian yang tidak melibatkan nilai-nilai. Proses pembentukan karakter seorang anak berlangsung melalui proses pembelajaran yang panjang. Karakter bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir; ia dibentuk oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarnya.

Menurut Lickona (dalam Muslich, 2011:75). Siswa tanpa karakter adalah manusia yang tidak memiliki jati diri. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Karakter memiliki urgensi yang tinggi, sehingga institusi pendidikan bertanggung jawab untuk menanamkannya melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk mencegah ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Lickona (2008) menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam karakter yang baik: (1) Pengetahuan moral: Ini mencakup kesadaran moral, pemahaman nilai-nilai moral, kemampuan mengambil perspektif, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri, (2) Perasaan moral: Ini meliputi hati nurani, harga diri, empati, kecintaan terhadap kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati, (3) Tindakan moral: Ini berkaitan dengan kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Sedangkan Fathurrohman (2013:97) menyatakan bahwa fungsi pendidikan karakter meliputi: (1) **Pengembangan**: Mengembangkan potensi peserta didik agar berperilaku baik dan mencerminkan karakter serta identitas bangsa, (2) **Perbaikan**: Memperkuat peran pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik yang lebih bermartabat, (3) **Penyaring**: Menyaring karakter bangsa sendiri serta karakter bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diharapkan.

Keberadaan multikultural di sekolah merupakan indikator penting dalam mendukung implementasi pendidikan karakter. Budaya sekolah yang dibangun berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada semua warga sekolah baik pendidik maupun siswa. Sekolah perlu membentuk budaya yang komunikatif tentang nilai-nilai karakter, memelihara nilai-nilai tersebut, serta menghargai pencapaian setiap individu di lingkungan sekolah. Kesadaran akan pentingnya multikultural bagi warga sekolah akan mempermudah perkembangan karakter melalui interaksi multikultural.

Simpulan

Pendidikan multikultural perlu diatur dalam konteks masyarakat yang menghadapi berbagai masalah antar kelompok, budaya, dan suku. Oleh karena itu, proses pendidikan multikultural tidak hanya dapat disamakan dengan sekolah atau program pendidikan formal, serta harus menghindari pandangan yang mengidentikkan kebudayaan dengan kelompok etnis tertentu. Untuk itu, implementasi pendidikan multikultural di sekolah semakin mendesak, karena sekolah dapat berfungsi sebagai arena untuk menghilangkan prasangka dan sekaligus melatih serta membentuk karakter siswa agar dapat bersikap demokratis, humanis, dan pluralis. Untuk membangun pendidikan multikultural di sekolah, diperlukan dua hal: pertama, melakukan dialog dengan menempatkan setiap peradaban dan kebudayaan pada posisi yang setara. Kedua, mengembangkan toleransi agar setiap kebudayaan memiliki kesempatan untuk saling memahami. Toleransi ini harus diterapkan tidak hanya pada tataran konseptual tetapi juga dalam praktik operasionalnya.

Referensi

- Afifah, N. 2017. Implementasi Pembelajaran Berbasis Multikultur dan Budaya di SD/MI. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1 (01).
- Alas, R. 2006. Ethics in Countries whit Diffrent Culture Dimensions, *Jurnal of Business Ethies*, 69, 237-247. <https://philpapers.org/rec/ALAEIC>.
- Alexander, D. 2015. School Policy in Russia and The Challenges of A Multicultural Society. Dari *Procedia - Social and Behavioral Science*, 186 811 – 814. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
- Alwisol, 2008. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Lisak, Adan Erez, M. 2014. Leadership emergence in multicultural teams: The power of global characteristics. *Journal of World Business*, 666, 1-12. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951614000030>
- Bank, J.A. 2011. Multicultural education: Historical Development, Dimensions, and Practice. Review of Research in Education, 19, 3-49. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>
- Christopher, M.B. 2016. Middle leadership in higher education: A relational analysis. Dari *Educational Management Administration & Leadership*, Volume 44(1), 128–145.
- Ekşi, H. 2003. *Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları*. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 1 (1), 79-96.
- Ekosiswoyo, R. 2007. Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 14 (2).
- Fatrurrohman, P, dkk. 2013. *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Freire, P. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Alois A. Nugroho, Jakarta: Gramedia,
- H.A.R, Tilaar. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Hong, Y., & Chiu, C. (2001). Toward a paradigm shift: From cross-cultural differences in social cognition to social-cognitive mediation of cultural differences. *Social Cognition*, 19, 181–196.
- Kemendiknas, 2010. *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta.
- Kitayama, S. (2002). Culture and basic psychological processes - toward a system view of culture. *Psychological Bulletin*, 28 (1), 89-96.
- Lickona, T. 2008. *Educating for Character. How Our School Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

- Lee, C.-Y. et al. 2013. E-character education among digital natives: Focusing on character exemplars. *Computers & Education*, 67, 58–68
- Malakolunthu, S. 2010. Culturally responsive leadership for multicultural education: The case of “Vision School” in Malaysia. Dari *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 9, 1162–1169.
- Merlin, C. 2017. *School Counselors and Multicultural Education: Applying the Five Dimensions*. (Online), (<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1144757.pdf>)
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sergiovanni, T. J. 2006. *The principalship: a reflective practice perspective*. (6th ed). Boston: *Pearson Education, Inc.*
- Suriansyah, A dan Aslamiah. strategi kepemimpinan kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter siswa. *Cakrawala Pendidikan*, 2.
- Tsai, C.-C. (2009). Conceptions of learning versus conceptions of web-based learning: the differences revealed by college students. *Computers & Education*, 53, 1092–1103.
- Thoriquttyas, T and Rohmawati, N. 2017. Amplifying The Character Education And The Multiculturalism For a Nationalism Building. *Tadris*, 12 (2).
- Tukiyo *at al.* 2017. Leadership 3.0 Based Principal’s Leadership to Improve Teachers’ Work in Multicultural Society. *Proceedings Ictess Unisri*, 1 (1).
- Ülgera, M. 2014. Secondary School Teachers’ Beliefs On Character Education Competency. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 131, 442 – 449.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Xing, T. 2012. Cultural Diversity and Integrated Multicultural Education. *Front. Education China*, 7(2), 163–168. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03396939.pdf>
- Yantoro, 2013. Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan Sekolah efektif. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 15, (1), 61-72.
- Zander, L., Mockaitis, A. I., & Butler, C. L. (2012). Leading global teams. *Journal of World Business*, 47(4): 592–603.